

PENTINGNYA KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN KOLEKSI PADA ORGANISASI PERPUSTAKAAN

Anita Tri Widiyawati

Dosen Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya Malang
anitatriwidiyawati@ymail.com

Abstrak

Kebijakan pengembangan koleksi adalah tahapan pertama yang ada pada pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi sangat penting sebagai pedoman untuk menentukan arah dari pengembangan koleksi. Hal yang sangat bertentangan di lapangan, banyak kasus pada organisasi perpustakaan yang hanya mempunyai kebijakan pengembangan koleksi secara lisan dan tidak jelas bahkan terdapat perpustakaan yang tidak mempunyai kebijakan pengembangan koleksi baik secara tertulis maupun lisan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan koleksi, maka perpustakaan tidak akan dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pemustaka. Dalam kebijakan pengembangan koleksi dituntut untuk memformulasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Dalam proses pengembangan koleksi, pengelola perpustakaan harus memperhatikan kemampuan dari organisasi perpustakaan dan kebutuhan pemustaka sebagai masyarakat yang menerima sasaran layanan dari organisasi perpustakaan, termasuk dalam membuat kebijakan pengembangan koleksi. Dalam hal ini pengelola perpustakaan dapat menggunakan analisis SWOT. Di dalam membuat kebijakan pengembangan koleksi terdapat beberapa model yang bisa digunakan, yakni: *narrative model, classed model, combined narrative and classed models, dan supplemental policies.*

Kata kunci: pengembangan koleksi, kebijakan, organisasi perpustakaan.

Pendahuluan

Koleksi merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi perpustakaan. Tidak ada bedanya dengan udara bagi manusia. Tanpa udara manusia tidak dapat bernafas. Eksistensi manusia yang pertama ditentukan oleh udara, baru setelah itu ditentukan oleh kualitas hidup dari manusia itu sendiri. Kualitas hidup di sini berkaitan dengan kesehatan, keuangan, kemampuan, dan segala hal yang mendukung kualitas hidup tersebut. Begitu juga organisasi perpustakaan. Tanpa koleksi organisasi perpustakaan tidak akan dapat hidup. Eksistensi dari organisasi perpustakaan yang pertama ditentukan oleh kualitas dari koleksi itu sendiri. Kualitas koleksi ini berkaitan antara kesesuaian koleksi dengan kebutuhan pemustaka serta kegiatan-

kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kualitas dari koleksi.

Terdapat tahapan-tahapan kegiatan yang dapat dilakukan oleh organisasi perpustakaan dalam menjaga kualitas koleksi yang dimiliki. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Evans dalam Yulia dan Sujana (2009:1.9) bahwa “pengembangan koleksi terdiri dari enam komponen kegiatan yang terdiri atas: (1) analisis masyarakat, dalam hal ini masyarakat pengguna; (2) kebijakan seleksi; (3) seleksi; (4) pengadaan; (5) penyiangan; dan (6) evaluasi. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan seleksi harus berdasar pada hasil analisis masyarakat pengguna/pemustaka. Penentuan kebijakan seleksi yang tepat berdampak pada kesesuaian koleksi yang

diinginkan oleh pemustaka. Hal ini juga berimbang pada kepuasan pemustaka terhadap layanan yang diberikan oleh organisasi perpustakaan melalui koleksi yang tersedia. Kepuasan pemustaka menunjukkan eksistensi dari organisasi perpustakaan itu sendiri.

Johnson (2009:72) menyebutkan bahwa “*libraries without collection development policies are like businesses without business plan.*” (Perpustakaan tanpa kebijakan pengembangan koleksi seperti bisnis tanpa perencanaan bisnis). Berdasarkan pernyataan dari Johnson tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan koleksi sangat penting untuk memberikan arah bagi organisasi perpustakaan layaknya perencanaan bisnis dalam kegiatan bisnis. Setelah ide untuk memulai usaha muncul, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan usaha (Suryana, 2014:192). Begitu pula pada organisasi perpustakaan, setelah ide untuk mendirikan perpustakaan muncul, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat kebijakan pengembangan koleksi.

Peggy Lambing (dalam Suryana, 2014:192) menyatakan bahwa:

Perencanaan usaha adalah suatu cetak biru tertulis (*blue-print*) yang berisikan tentang misi usaha, usulan usaha, perincian finansial, strategi usaha, peluang pasar yang mungkin diperoleh, dan kemampuan serta keterampilan pengelolanya. Perencanaan usaha sebagai persiapan awal memiliki dua fungsi penting, yaitu: (a) sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, (b) sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar.

Layaknya perencanaan usaha yang dikemukakan oleh Peggy Lambing, kebijakan pengembangan koleksi merupakan suatu cetak biru tertulis (*blue-print*) yang berisikan tentang misi perpustakaan, usulan koleksi, operasional pengembangan koleksi, perincian finansial, strategi pengembangan koleksi, peluang pasar (pemustaka atau masyarakat pemakai) yang mungkin diperoleh, serta kemampuan

dan keterampilan pengelolanya (pustakawan).

Kenyataan di lapangan banyak organisasi perpustakaan yang mengabaikan kebijakan pengembangan koleksi. Seringkali dalam pelaksanaan pengembangan koleksi, kebijakan pengembangan koleksi diberlakukan secara lisan tidak secara tertulis, hanya dilengkapi dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), bahkan tidak sedikit pula organisasi perpustakaan yang tidak mempunyai kebijakan pengembangan koleksi baik tertulis maupun lisan. Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian dan observasi mencerminkan bahwa kebijakan pengembangan koleksi masih belum dianggap penting oleh pengelola perpustakaan, bahkan ada pula yang belum memahami adanya kebijakan pengembangan koleksi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh: (1) Anita Tri Widiyawati (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Koleksi di Perpustakaan IKIP Budi Utomo Malang”, (2) Noor

Fahimah (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Koleksi Umum dan Koleksi Referensi pada Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Informasi Pengguna (Studi pada Perpustakaan Politeknik Negeri Malang)”, Erene Dwi Permatasari (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Koleksi Elektronik dan Tercetak (Studi pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Malang), (4) prariset yang dilakukan oleh Amirul Dwi Septina (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Koleksi *Local Content* dalam Menunjang Layanan Perpustakaan (Studi pada Perpustakaan STIE Malangkuçèwara)”, serta hasil observasi yang dilakukan oleh penulis sendiri (2017), yakni pengembangan koleksi yang ada di Perpustakaan SDN Cakru II Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dan pengembangan koleksi pada Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISOSPOL) Waskita Dharma Malang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anita Tri Widiyawati (2016) yaitu tidak ada kebijakan pengembangan koleksi

baik secara tertulis maupun lisan. Hasil penelitian yang diungkapkan oleh Noor Fahimah (2016) yaitu terdapat kebijakan pengembangan koleksi secara lisan. Hasil penelitian yang dinyatakan oleh Erene Dwi Permatasari (2017) yaitu terdapat kebijakan pengembangan koleksi secara lisan. Hasil pra riset yang dilakukan oleh Amirul Dwi Septina (2017) yaitu terdapat kebijakan pengembangan koleksi secara lisan. Hasil observasi (2017) yang dilakukan oleh penulis di Perpustakaan SDN Cakru II Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, dan di Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISOSPOL) Waskita Dharma Malang yaitu tidak terdapat kebijakan pengembangan koleksi baik secara tertulis maupun lisan. Tidak adanya kebijakan pengembangan koleksi berdampak pada kegiatan pengembangan koleksi yang tidak maksimal, sehingga berdampak pula terhadap layanan yang kurang maksimal pada pemustaka. Kebijakan pengembangan koleksi secara lisan juga masih berakibat pada kegiatan pengembangan yang kurang maksimal. Hal ini dikarenakan, kebijakan pengembangan koleksi secara lisan menyebabkan perbedaan-perbedaan persepsi antarpengelola perpustakaan. Perbedaan persepsi tersebut menyebabkan kebingungan pada lini di bawahnya dalam kegiatan pengembangan koleksi. Pada dasarnya kebijakan pengembangan koleksi seharusnya secara tertulis, sehingga menjadi pedoman dan arah yang jelas dalam kegiatan pengembangan koleksi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membahas tentang

“Pentingnya Kebijakan dalam Pengembangan Koleksi Perpustakaan”.

Pembahasan

Koleksi merupakan hal yang utama pada organisasi perpustakaan. Tanpa koleksi, organisasi perpustakaan akan kehilangan ruh untuk hidup. Jiwa dari perpustakaan adalah koleksi. Semakin baik koleksi yang dimiliki perpustakaan maka semakin cerahlah masa depan dari organisasi perpustakaan itu. Semakin buruk koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan, maka semakin terpuruklah organisasi

perpustakaan itu. Standarisasi mengenai baik dan buruknya koleksi perpustakaan ditentukan oleh kepuasan dari pemustaka. Semakin terpenuhinya kebutuhan koleksi yang diinginkan pemustaka maka dapat dikatakan organisasi perpustakaan akan menjadi eksis. Sebaliknya semakin tidak terpenuhinya kebutuhan koleksi yang diinginkan pemustaka, dapat dipastikan pemustaka akan meninggalkan perpustakaan. Sehingga untuk menghindari citra buruk dari organisasi perpustakaan yang disebabkan oleh koleksi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pemustaka, maka organisasi perpustakaan harus melakukan pengembangan koleksi perpustakaan.

Qalyubi (2007:77) menyatakan bahwa “pengembangan koleksi merupakan proses memastikan bahwa kebutuhan informasi dari para pemakai akan terpenuhi secara tepat waktu dan tepat guna dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang dihimpun oleh perpustakaan. Sumber-sumber informasi tersebut harus dikembangkan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi perpustakaan dan masyarakat yang dilayani”. Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Qalyubi tersebut menunjukkan bahwa organisasi perpustakaan berkewajiban untuk melakukan pengembangan koleksi. Dalam melakukan pengembangan koleksi yang harus diperhatikan oleh pengelola perpustakaan adalah memastikan bahwa kebutuhan informasi melalui koleksi perpustakaan yang telah dikembangkan dapat terpenuhi secara tepat waktu dan tepat guna. Dalam proses pengembangan koleksi, pengelola perpustakaan harus memperhatikan kemampuan dari organisasi perpustakaan dan kebutuhan pemustaka sebagai masyarakat yang menerima sasaran layanan dari organisasi perpustakaan. Untuk melihat kemampuan organisasi perpustakaan dengan tetap memperhatikan pemenuhan terhadap kebutuhan pemustaka, maka pengelola perpustakaan dapat membuat analisis SWOT (*Strength* ‘kekuatan’, *Weakness* ‘kelemahan’, *Opportunities* ‘peluang’, dan *Threat* ‘ancaman’). Menurut Rangkuti (2008:18), “analisis SWOT adalah identifikasi

berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan”.

Sehingga analisis SWOT pada organisasi perpustakaan berguna untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perpustakaan. Dengan melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki organisasi perpustakaan maka hal ini akan menunjang pengetahuan pengelola perpustakaan untuk mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki oleh organisasi perpustakaan.

Magrill dan Corbin (dalam Qalyubi, 2007:77) menyatakan bahwa:

“pengembangan koleksi merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang bertujuan mempertemukan pemakai dengan rekaman informasi dalam lingkungan perpustakaan atau unit informasi. Kegiatan pengembangan koleksi mencakup, antara lain: penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, pemilihan, pengadaan, penyiajangan, serta evaluasi pendayagunaan koleksi”.

Berdasarkan pendapat tersebut, penyusunan kebijakan pengembangan koleksi pada tahapan/proses dalam pengembangan koleksi teletak di awal atau pada tahapan/proses yang pertama. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan pengembangan koleksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan koleksi secara keseluruhan melalui tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan koleksi. Berikut uraian mengenai pentingnya kebijakan pengembangan koleksi pada organisasi perpustakaan.

A. Kebijakan Pengembangan Koleksi

Kebijakan pengembangan koleksi (*collection development policies*) juga disebut sebagai kebijakan seleksi (*selection policies*), pernyataan koleksi (*collection statements*), atau perencanaan pengembangan koleksi (*collection development plans*) (Johnson, 2009:72). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Johnson tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan koleksi merupakan pedoman yang menentukan arah dari pengembangan dan pemeliharaan koleksi. Sehingga setiap organisasi perpustakaan sangat penting untuk

menyusun kebijakan pengembangan koleksi agar organisasi perpustakaan mempunyai arah yang jelas dalam mengembangkan koleksinya. Tanpa kebijakan pengembangan koleksi dapat dipastikan organisasi perpustakaan tidak akan bisa mengembangkan koleksi yang dapat memenuhi kebutuhan pemustaka.

Menurut Yulia, dkk (dalam Saleh dan Komalasari, 2010:3.3) fungsi dari kebijakan pengembangan koleksi adalah.

1) Pedoman bagi para selektor

Dengan adanya kebijakan, para selektor bekerja lebih terarah karena sasaran jelas, dan dana yang terbatas dimanfaatkan dengan lebih bijaksana.

2) Sarana komunikasi

Kebijakan akan memberitahukan pada para pemakai, administrator, dewan pembina, dan pihak lain apa cakupan, serta ciri-ciri koleksi yang telah ada dan rencana untuk pengembangan selanjutnya.

3) Sarana perencanaan

Kebijakan memberi informasi yang akan membantu dalam proses alokasi dana.

Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Sánchez dan Guerrero (dalam Vignau dan Meneses, 2005: 35-43), “*formulation and/or revision of the policies. It is the first aspect of extreme importance to collection development since it is the intellectual activity that involves planning.*”

(Perumusan dan/atau revisi kebijakan. Ini adalah aspek pertama yang sangat penting bagi pengembangan koleksi karena ini adalah aktivitas intelektual yang melibatkan perencanaan.

B. Pengajuan Kebijakan Pengembangan Koleksi

Terdapat dua fungsi layanan dalam pengajuan kebijakan pengembangan koleksi, yaitu: untuk menginformasikan dan untuk memproteksi (Johnson, 2009:73). Sebagai sasaran dari dua fungsi layanan tersebut adalah peserta yang terlibat dalam pembuatan kebijakan pengembangan koleksi. Peserta yang dimaksud di sini adalah semua personel yang ada pada organisasi perpustakaan, pemustaka, dan stakeholder (pemangku kepentingan) yang lain. Hal ini bergantung pada jenis

perpustakaannya. Misalnya di perpustakaan sekolah dapat melibatkan siswa, guru, orang tua murid, bahkan komite sekolah. Kebijakan pengembangan koleksi pada perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum berkaitan dengan kebijakan dewan pemerintahan resmi. Sehingga dalam penyusunan kebijakan pengembangan koleksi juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan organisasi perpustakaan. Berikut penjelasan mengenai fungsi layanan pengajuan kebijakan pengembangan koleksi.

1) Untuk menginformasikan (*to inform*)

Kebijakan pengembangan koleksi merupakan hal yang pertama dalam menunjukkan misi perpustakaan dan menggambarkan kekuatan serta kelemahan koleksi mutakhir/kini yang dimiliki oleh perpustakaan. Selain itu, kebijakan pengembangan koleksi juga dapat menginformasikan alur tujuan dari perpustakaan di masa yang akan datang (Johnson, 2009:74). Dengan mengidentifikasi misi perpustakaan, kekuatan dan kelemahan koleksi terbaru yang dimiliki oleh perpustakaan, serta alur perencanaan perpustakaan di masa depan, baik untuk dapat membantu menginformasikan anggaran baik mempersiapkan dan mengalokasikan dana internal dari organisasi perpustakaan maupun dana eksternal dari organisasi perpustakaan.

2) Untuk memproteksi (*to protection*)

Kebijakan pengembangan koleksi dapat memproteksi tekanan dari lingkungan eksternal (Johnson, 2009:75). Pernyataan yang diputuskan dalam kebijakan pengembangan koleksi dapat melindungi kebebasan intelektual dan manjaga sensor, khususnya berkaitan dengan akses perpustakaan di internet. Perpustakaan dapat menyiapkan pernyataan terbaik dalam menangani komplain yang berkaitan dengan koleksi perpustakaan melalui prosedur yang telah diputuskan dalam kebijakan pengembangan koleksi. Pernyataan tentang senshorsip tidak semuanya negatif, akan tetapi dengan adanya kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis menunjukkan komitmen dari organisasi

perpustakaan untuk menjunjung tinggi kebebasan intelektual.

C. Membuat Kebijakan Pengembangan Koleksi

Kebijakan pengembangan koleksi dapat dibuat atau ditulis oleh individu atau komite, harus memperhatikan tujuan utama dan khalayak (masyarakat pemakai/pemustaka) saat menulis/membuat kebijakan pengembangan koleksi dan serta menyesuaikan dengan dokumen yang tepat. Kebijakan pengembangan koleksi dapat dibagi melalui konsorsium dan digunakan untuk kerjasama dalam membuat perencanaan pengembangan koleksi harus sesuai dengan gaya orang lain (anggota kerjasama) di dalam konsorsium (Johnson, 2009:77). Konsorsium tersebut melibatkan semua personel perpustakaan, pemustaka, dan stakeholder yang lain. Misalnya jika pada perpustakaan sekolah melibatkan guru, orang tua murid, komite sekolah, ataupun pihak lain yang menjadi sponsor dari perpustakaan sekolah tersebut. Pelibatan peserta dalam konsorsium disesuaikan dengan jenis organisasi perpustakaan.

Frank W. Hoffman and Richard J. Wood dalam (dalam Johnson, 2009:77) mengidentifikasi komponen-komponen penting yang harus ada dalam pembuatan kebijakan pengembangan koleksi, antara lain:

- 1) *purpose statement* (maksud pernyataan)
- 2) *background statement* (latar belakang pelaksanaan pengembangan koleksi)
- 3) *responsibility for collection development* (tanggung jawab/penanggung jawab dalam pengembangan koleksi)
- 4) *mission, goals, and objectives* (misi, tujuan, dan sasaran pengembangan koleksi)
- 5) *target audiences* (target masyarakat pemakai/pemustaka)
- 6) *budgeting and funding* (penganggaran dan pendanaan)
- 7) *evaluation criteria* (kriteria evaluasi)
- 8) *format* (susunan)
- 9) *goverment publication* (terbitan pemerintah)

- 10) *treatment of specific resource groups*
(perlakuan terhadap kelompok sumber informasi tertentu)
- 11) *special collections* (koleksi khusus)
- 12) *resources sharing* (sumber berbagi)
- 13) *services* (pelayanan)
- 14) *selection aids* (alat bantu seleksi)
- 15) *copyright* (hak cipta)
- 16) *intellectual freedom* (kebebasan intelektual)
- 17) *acquisitions* (akuisisi)
- 18) *gifts and exchange* (hadiyah dan tukar-menukar koleksi)
- 19) *collection maintenance* (pemeliharaan koleksi)
- 20) *weeding* (penyiangan)
- 21) *collection evaluation* (evaluasi koleksi)
- 21) *policy revision* (revisi kebijakan)
- 22) *definition of terms and glossary* (definisi istilah dan glosarium)
- 23) *bibliography* (bibliografi)
- 24) *appendices* (lampiran)

D. Model Kebijakan Pengembangan Koleksi Tambahan (*Supplemental*)

Menurut (Johnson, 2009:79-82) terdapat empat model kebijakan pengembangan koleksi supplemental, yaitu: *narrative model* (model narasi), *classed model* (model berkelas), *combined narrative and classed model* (kombinasi model narasi dan model berkelas), dan *supplemental policies* (kebijakan tambahan). Berikut penjelasan mengenai empat model tersebut.

1) *narrative model* (model narasi)

Model narasi untuk pernyataan kebijakan pengembangan koleksi bersifat berbasis teks. Hal ini mencakup serangkaian uraian naratif, antara lain: subjek, disiplin, dan sub koleksi. Misalnya: Ilmu Sosial, Sastra, dan ilmu; fiksi dewasa, fiksi anak-anak, dan referensi), atau membagi pertanian menjadi ilmu hewan, agronomi, ilmu tanah. Tujuan dari model narasi ini adalah untuk memberikan pandangan terfokus tentang subjek atau subdivisi dan manajemen koleksi seperti yang dipraktikkan di perpustakaan dalam mempersiapkan penyusunan/pembuatan kebijakan pengembangan koleksi. Keuntungan dari model narasi adalah

penggunaan istilah untuk menggambarkan program dan koleksi lokal yang dimiliki oleh organisasi perpustakaan. Pernyataan kebijakan ini umumnya mengikuti garis besar dan isi ikhtisar. Masing-masing membahas komunitas pengguna tertentu, keterbatasan atau penekanan spesifik, jenis materi yang dikumpulkan atau dikecualikan, unit perpustakaan atau pemilih yang bertanggung jawab untuk pengumpulan ini, hubungan interdisipliner, sumber daya tambahan, dan faktor lokal lainnya.

2) *classed model* (model berkelas/penggolongan)

Model berkelas/penggolongan menggambarkan pengumpulan dan tingkat pengumpulan terbaru dalam bahasa dan kode numerik yang disingkat, biasanya sesuai dengan the Library of Congress atau Dewey Decimal Classification (DDC). Hal ini juga menggambarkan tingkat pelestarian dan tingkat pengumpulan di masa depan. The Research Libraries Group (RLG) adalah pemimpin dalam pengembangan *outline* format analisis berkelas/penggolongan. Dalam sistem ini, kategori subjek ditentukan oleh rentang klasifikasi dan deskriptor subjek. Setiap kategori diberi serangkaian angka untuk kekuatan koleksi yang ada, intensitas pengumpulan saat ini, dan intensitas pengumpulan yang diinginkan.

Angka, indikator kedalaman koleksi saat ini, berkisar dari 0 (di luar ruang lingkup - tidak ada yang dikumpulkan dalam subjek ini) sampai 5 (pengumpulan menyeluruh, bersifat: menyeluruh, inklusif, dan intensif).

Catatan cakupan dapat digunakan untuk mendeskripsikan fitur spesial dari bagian koleksi. Pelaporan tingkatan 4 atau 5 bukan berarti perpustakaan sudah lebih baik. Bagian terpenting dalam menggunakan indikator kedalaman koleksi adalah memahami bagaimana pemilih (*selector*) perpustakaan mengumpulkan dan menyesuaikan praktik dengan misi, tujuan, sasaran, dan pendanaan perpustakaan.

- 3) *combined narrative and classed model*
(kombinasi model narasi dan model berkelas)

Kombinasi dari model narasi dan berkelas/digolongkan meminjam fitur yang paling berguna dari masing-masing untuk menggambarkan rencana pengumpulan secara ringkas. Biasanya cukup singkat, tidak lebih dari dua sampai empat halaman, dan dapat berfungsi sebagai alat yang berguna saat ditinjau dan diperbarui karena lingkungan dan sumber daya yang tersedia berubah.

- 4) *supplemental policies* (kebijakan tambahan)

Kebijakan tambahan digunakan dalam rangka menangani prosedur untuk hubungan donor dan pertimbangan lain yang terkait dengan penerimaan dan penurunan hadiah serta peluang pembelian yang besar. Kebijakan pelestarian membahas kebijakan dan prosedur untuk menjaga kondisi fisik koleksi. Kriteria ini untuk membuat keputusan tentang pengikatan, konservasi, pemformatan ulang, dan pilihan perawatan lainnya, serta prioritas alokasi sumber pelestarian. Pernyataan terpisah tentang kebijakan penyiaian dan deseleksi sangat bermanfaat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tambahan berguna untuk meninjau materi yang ditransfer antarkoleksi, transfer ke penyimpanan jarak jauh, dan penarikan. Hal ini termasuk pedoman untuk membatalkan langganan berkala dan mengurangi bahan yang tidak dibutuhkan.

Ketika sumber elektronik menjadi bagian dari koleksi perpustakaan, banyak perpustakaan mengembangkan kebijakan tambahan untuk mengatasi kerumitan pemilihan dan pengelolaannya. Selama beberapa tahun terakhir, banyak perpustakaan telah beralih dari kebijakan secara terpisah untuk sumber informasi elektronik, dengan asumsi bahwa pedoman, praktik, dan kriteria yang sama berlaku untuk semua sumber informasi tanpa memperhatikan format atau mekanisme pengiriman.

Persyaratan unik dalam sumber informasi elektronik umumnya berlaku untuk bagaimana perpustakaan menangani kontrak dan lisensi, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas tinjauan dan negosiasi *e-resources* dan peran penyeleksi individual dalam prosesnya, isu-isu ini lebih memungkinkan jika ditangani dengan menggunakan dokumen prosedur internal serta dapat merekam proses seleksi dan akuisisi (misalnya: siapa yang memiliki wewenang untuk meninjau, menyetujui, dan menandatangani kontrak dan perjanjian lisensi). Contoh, Perpustakaan mewajibkan semua sumber informasi elektronik (*e-resources*) menyediakan tingkat dan format statistik penggunaan tertentu, adanya ijin penggunaan oleh pemustaka yang bukan anggota perpustakaan, adanya kepastian akses arsip sumber informasi, adanya kewajiban dari organisasi perpustakaan yang tidak menerima ganti rugi. Kebijakan baru yang berfokus pada *e-resources* baru-baru ini muncul di perpustakaan akademis - sebuah kebijakan tentang migrasi ke elektronik - versi jurnal saja. Perpustakaan mengembangkan kebijakan ini untuk menjelaskan kriteria yang harus dipenuhi agar bisa memperoleh hanya bentuk elektronik jurnal dan tidak memperoleh versi cetak paralel. Kriteria utama cenderung menyediakan konten ilmiah lengkap dari padanan cetak, ketersediaan simultan atau lebih awal dari pada publikasi cetak, gambar dan kualitas grafis setara dengan versi cetak, keandalan penerbit, dan akses terus-menerus ke semua konten yang telah dibayar oleh perpustakaan.

Kesimpulan

Tahapan/proses awal dalam kegiatan pengembangan koleksi yang harus dilalui adalah kebijakan pengembangan koleksi. Kebijakan pengembangan koleksi merupakan petunjuk arah bagi organisasi perpustakaan untuk melakukan kegiatan pengembangan koleksi. Tanpa kebijakan pengembangan koleksi, organisasi

perpustakaan akan kehilangan arah yang jelas dalam upaya memenuhi kepuasan pemustaka. Pemenuhan kepuasan pemustaka ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pemustaka akan koleksi/sumber informasi yang ingin didapatkan. Dalam membuat kebijakan, pengelola perpustakaan harus memperhatikan kemampuan dari organisasi perpustakaan itu sendiri dan kemampuan dari pemustaka dengan tidak mengabaikan tujuan utama. Untuk mengetahui kemampuan ini, maka pengelola perpustakaan dapat menggunakan analisis SWOT. Dengan mengetahui hasil dari analisis SWOT, diharapkan pengelola perpustakaan tidak salah dalam menentukan langkah.

Terdapat empat model yang dapat digunakan dalam membuat kebijakan pengembangan koleksi, yakni: *narrative model* (model narasi), *classed model* (model berkelas/golongan), *combined narrative and classed models* (kombinasi model narasi dan berkelas/golongan), dan *supplemental policies* (kebijakan tambahan). Isu-isu mengenai pengembangan koleksi semakin kompleks, khususnya yang berkaitan dengan *e-resources*, sehingga pada perkembangannya yang lebih banyak digunakan adalah model *supplemental policies*. Hal ini dikarenakan dalam model *supplemental policies*, kebijakan pengembangan koleksi tidak perlu dibuat secara terpisah sehingga lebih memudahkan dan lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Amirul Dwi Septina. 2017. Pengembangan Koleksi *Local Content* dalam Menunjang Layanan Perpustakaan (Studi pada Perpustakaan STIE Malangkuçècvara). Proposal Penelitian. Program Studi Ilmu Perpustakaan, Jurusan Administrasi Publik, Fia-UB.
- Anita Tri Widiyawati. 2016. *Pengembangan Koleksi di Perpustakaan IKIP Budi Utomo Malang*. Laporan Penelitian. Program Studi Ilmu Perpustakaan, Jurusan Administrasi Publik, Fia-UB. Studi Ilmu Perpustakaan, Jurusan Administrasi Publik, Fia-UB.
- Erene Dwi Permatasari. 2017. *Pengembangan Koleksi Elektronik dan Tercetak (Studi pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Malang)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Perpustakaan, Jurusan Administrasi Publik, Fia-UB.
- Johnson, Peggy. 2009. *Fundamentals of Collection Development and Management*. Chicago: American Library Association.
- Noor Fahimah. 2016. *Pengembangan Koleksi Umum dan Koleksi Referensi dan Koleksi Referensi pada Perpustakaan Perguruan Tinggi Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Informasi Pengguna (Studi pada Perpustakaan Politeknik Negeri Malang)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Perpustakaan, Jurusan Administrasi Publik, Fia-UB.
- Qalyubi, Shihabuddin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI), Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga.
- Rangkuti, Freddy. 2008. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saleh dan Komalasari. 2010. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suryana. 2014. *Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Vignau, Barbara Susana Sanchez dan Meneses, Barbara Susana Sanchez. 2005. "Collection development policies in university libraries: a space for reflection", Collection Building, Vol. 24 Issue: 1, pp.35-43, doi: 10.1108/01604950510576119 diakses melalui <http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/01604950510576119> pada tanggal 19 April 2017.
- Yulia, Yuyu dan Jayanti G Sujana. 2009. *Pengembangan Koleksi*. Jakarta: Universitas Terbuka.

